

Sumber : <i>Republika</i>	Hari/Tgl : <i>Jumat, 04 oktober 2019</i>	Hlm/Kol : <i>v1 / 1</i>
Subjek : <i>peran DPS</i>		Bidang : <i>Hukum</i>

Memantapkan Peran DPS

● HENDRI TANJUNG

Dalam pembukaan ijtima sanawi (*annual meeting*) Dewan Pengawas Syariah (DPS) 2019 yang dilaksanakan di Aston Bogor, 2 Oktober 2019, Ketua Dewan Syariah nasional MUI Prof Dr KH Ma'ruf Amin mengatakan, DPS dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sering disebut dengan revolusi industri 4.0.

Alasannya, bisnis ke depan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi digital. Ijtima akan berlangsung sampai 4 Oktober. Tema ijtima kali ini adalah "Memantapkan Peran DPS dalam Rangka Mendukung Arus Baru Ekonomi Indonesia di Era Revolusi Digital".

Arus Baru ekonomi Indonesia dicirikan oleh tiga hal, yaitu keadilan, keumatan, dan kemandirian (kedaulatan). Keadilan adalah ekonomi yang berlandaskan pada ketuhanan, sila pertama dari Pancasila.

Keumatan dicirikan ekonomi yang berbasis kerakyatan, sebagai cerminan sila keempat dan kelima. Kemandirian (kedaulatan) adalah ekonomi yang berdaulat dan mandiri. Untuk mewujudkan arus baru ekonomi tersebut, diperlukan peran strategis dari DPS.

Perkembangan ekonomi syariah

Jika dilihat ke belakang, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, setidaknya ekonomi syariah sudah mengalami tiga dekade perkembangannya. Dekade pertama ditandai dengan berdirinya bank syariah pada 1992 dan asuransi takaful tahun 1994.

Dekade kedua, tahun 2000, Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII). Pada dekade ini juga diterbitkan obligasi syariah pertama oleh Indosat. Disusul oleh UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga syariah negara (SBSN). Lalu UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dekade ketiga, Indonesia ditempatkan di peringkat ke-10 dunia untuk *halal countries* dengan skor 36 oleh The Global Islamic Economy Indikator (GIEI) 2016/17. Sementara itu, peringkat kesatu masih ditempati Malaysia.

Peringkat Indonesia untuk kategori makanan halal, *modest fashion*, serta *halal media and recreation* tidak termasuk 10 besar. Tetapi, untuk *Islamic Finance*, Indonesia menempati peringkat ke-10, untuk *halal travel* ke-4, dan untuk *halal pharmaceutical and cosmetics* menempati posisi kedelapan.

Melihat perkembangan tiga dekade terakhir, Indonesia berpeluang menjadi negara dengan ekonomi syariah terbesar di dunia, mengingat PDB Indonesia tahun 2018 lebih dari Rp 14.837 triliun.

Peran DPS

Dalam sambutannya, Ketua OJK Wimboh Santoso mengatakan, teknologi sudah menjadi keuntungan kompetitif bagi lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang tidak memanfaatkan teknologi akan ditinggalkan oleh kliennya.

Karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas DPS khususnya terkait teknologi. Ada empat harapan kepada DPS dalam memainkan peran strategisnya ke depan.

Pertama, peningkatan peran DPS sebagai mitra otoritas dalam memastikan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melalui komunikasi yang lebih baik dengan otoritas.

Hal ini terkait dengan *trust* (kepercayaan) masyarakat. Jika masyarakat sudah kehilangan kepercayaan, sulit bagi lembaga keuangan syariah untuk berkembang dan menjadi besar. Padahal, besarnya industri syariah merupakan kebutuhan.

Ukuran industri yang besar sangat diperlukan oleh lembaga keuangan syariah. Dengan ukuran yang besar, margin bisa diturunkan, akibatnya pembiayaan yang mereka berikan kelak menjadi lebih murah.

Bukan hanya itu, dengan ukuran yang besar maka keuntungan akan besar, gaji pe-

Sambungan

Sumber: *Republika*

Hari/Tgl: *Jumad, 04 Oktober 2019*

Hlm/Kol: *v1/1*

gawai lembaga keuangan syariah bisa besar, bonus pun bisa besar. Pada akhirnya, tercapai keuntungan bagi lembaga keuangan syariah, karyawannya, dan bagi nasabah.

Kedua, peningkatan kapasitas DPS khususnya terkait dengan produk dan jasa keuangan syariah berbasis teknologi. Tren sekarang, sudah banyak rentenir yang menggunakan teknologi finansial. Karena itu, DPS dituntut untuk membuat program tandingan.

Caranya, dengan membuat teknologi finansial juga tetapi yang syariah. Tentunya dengan bantuan pemrogram. Setidaknya, akad yang diaplikasikan adalah akad syariah, tetapi menggunakan teknologi.

Ketiga, pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan oleh DPS untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pengawasan prinsip syariah. Hal ini menjadi keniscayaan di tengah tengah revolusi industri 4.0.

Lemahnya pengawasan akan menurunkan kepercayaan. Penulis mengusulkan agar DPS proaktif dalam melakukan pengawasan dengan frekuensi yang lebih sering.

Keempat, peningkatan peran DPS dalam menciptakan ahli ahli keuangan syariah baru dalam memenuhi kebutuhan industri yang tumbuh pesat serta mendorong pengembangan produk syariah yang memiliki kekhasan syariah dan menjadi diferensiasi di industri keuangan secara umum serta berbasis teknologi.

Untuk hal ini, penulis berpikir bahwa DSN hendaknya dapat menciptakan kader kader baru DPS untuk ke depannya. Salah satu caranya adalah dengan membuat pelatihan-pelatihan di seluruh daerah di Indonesia.

Yang sekarang sangat kurang adalah DPS di koperasi syariah atau BMT. Apalagi, DPS yang bersertifikasi. Penulis berkali-kali diminta oleh beberapa koperasi untuk menjadi ketua pengawas syariah dengan alasan sudah bersertifikasi. Padahal, koperasinya ada di luar Jawa.

Nah, ke depan, perlu dipikirkan bagaimana menciptakan kader-kader DPS baru untuk 4.500-5.500 koperasi syariah atau BMT di Indonesia.

Dalam sebuah acara di Surabaya beberapa waktu lalu, kepala Dinas Koperasi Jawa Timur juga mengatakan, ada ribuan koperasi konvensional yang ingin konversi ke syariah. Namun, langkah itu terkendala di persyaratan DPS.

Alhamdulillah, sudah ada kebijakan sementara sebagai jalan keluar dari DSN-MUI, cukup dengan pelatihan dan lulus, sudah dapat menjadi DPS di koperasi syariah tanpa harus memiliki sertifikat sebagai Dewan Pengawas Syariah berlogo Garuda yang dikeluarkan oleh BNSP.

Empat peran yang diharapkan oleh OJK di atas dan satu peran yang diinginkan oleh menteri keuangan agar DPS dapat menangkap *appetite* (minat) masyarakat, dengan melahirkan instrumen syariah yang sesuai syariat Islam, menjadi strategis dan penting.

Penulis yakin, dengan kuatnya peran DPS, Indonesia sebagai negara dengan pangsa pasar syariah terbesar dunia akan terwujud. ■